

# **BAB I**

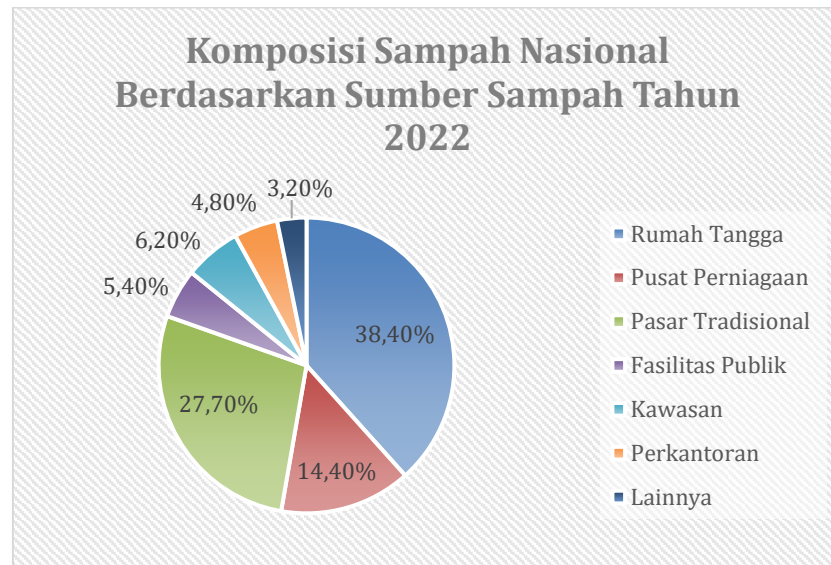
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sampah merupakan residu yang dihasilkan oleh manusia setelah melakukan berbagai aktivitas baik sebagai wujud perilaku konsumtif maupun produktif. Sampah telah menjadi *problem* di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Permasalahan sampah di Indonesia masih menjadi salah satu prioritas di masing-masing daerah yang memerlukan solusi berupa penanganan dan pengelolaan sampah yang profesional dan berkelanjutan.

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduknya menjadi salah satu yang terbesar di dunia yaitu sejumlah 278.696.200 jiwa (BPS, 2023), dengan total wilayah seluas 1,905,000  $km^2$ . (BPS, 2020).

Jumlah penduduk yang besar maka timbulan sampah di Indonesia tentunya juga besar yakni sebagaimana data yang diperoleh dari website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat timbulan sampah nasional pada tahun 2022 adalah sejumlah 35.110.804,83 ton/tahun (SIPSN, 2023) dengan rincian komposisi sampah berdasarkan sumbernya sebagai berikut.

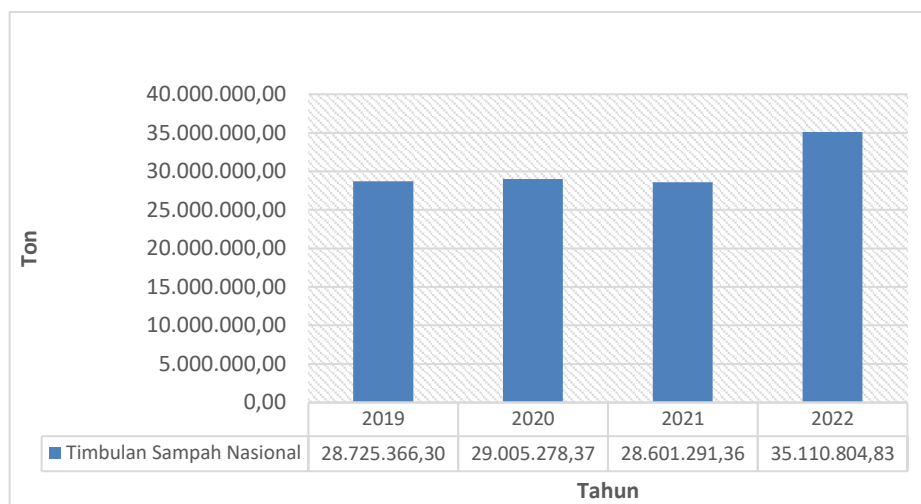


**Gambar 1 Komposisi Sampah Nasional Berdasarkan Sumber Sampah Tahun 2022**

Setiap individu atau proses alam yang menghasilkan limbah dapat dianggap sebagai penghasil sampah. Sumber sampah merupakan awal mula terjadinya limbah. Berdasarkan gambar di atas, komposisi sampah nasional paling tinggi berasal dari sumber sampah rumah tangga yakni sebesar 38,40% dari keseluruhan sumber sampah mengingat bahwa lonjakan sampah muncul sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk akibat dari perbedaan tingkat pengeluaran dan konsumsi masyarakat. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto et al. (2017), ditemukan bahwa masalah sampah akan semakin meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Sampah Rumah Tangga merujuk pada limbah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di dalam rumah tangga, yang tidak meliputi limbah tinja dan jenis sampah tertentu. Sementara itu, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga merujuk pada limbah yang berasal dari berbagai lingkungan seperti area komersial, industri, khusus, sosial, umum, dan fasilitas lainnya. Berikut merupakan data timbulan sampah nasional dari tahun 2019-2022.

**Gambar 2 Timbulan Sampah Nasional Tahun 2019-2022**



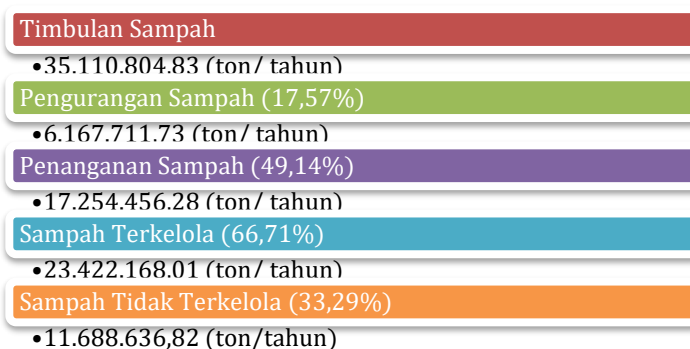
Sumber: SIPSN diolah, 2023

Sepanjang tahun 2019-2022, timbulan sampah sempat mengalami penurunan jumlah timbulan di tahun 2021 menjadi 28.601.291,36 ton yang sebelumnya berjumlah 29.005.278,37 ton di tahun 2020. Namun, sangat disayangkan pada tahun 2022 terjadi lonjakan timbulan sampah hingga meningkat menjadi 35.110.804,83 ton/ tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa timbulan sampah bergerak dinamis setiap tahunnya.

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai upaya konkret untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia. Lebih lanjut, pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota mengadopsi Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang mana kemudian dijadikan sebagai Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) sebagai acuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya di tingkat daerah. Adapun tujuan dari langkah ini adalah untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga serta sampah sejenisnya secara terintegrasi dan berkelanjutan.

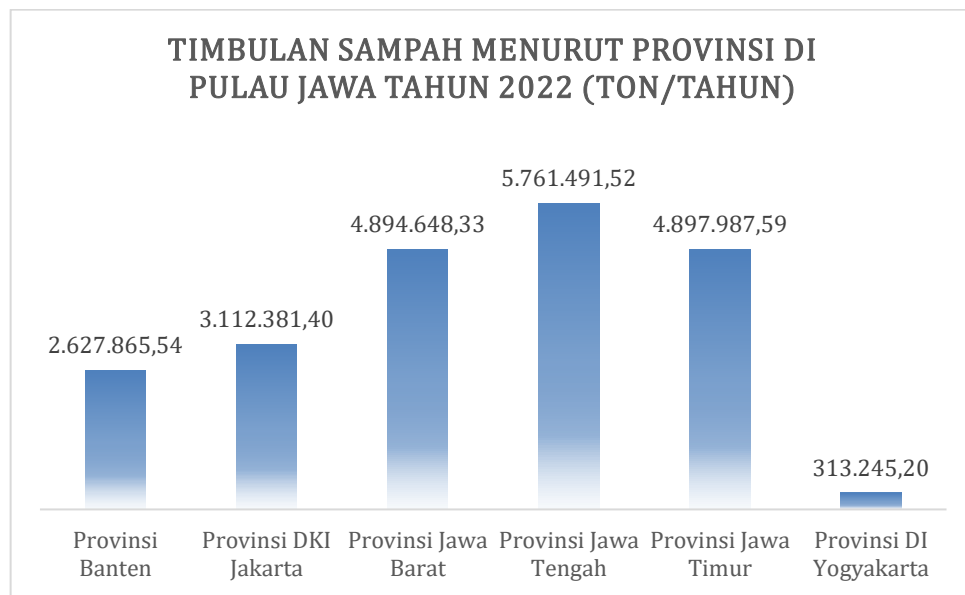
Berikut merupakan hasil capaian kinerja pengelolaan sampah nasional tahun 2022 yang ditampilkan di beranda SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)<sup>1</sup>.

### Gambar 3 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2022



<sup>1</sup> <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

Apabila melihat data timbulan sampah menurut provinsi, berdasarkan data dari SIPSN, provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi penghasil sampah terbesar nasional dan di pulau Jawa yakni pada tahun 2022 mencapai 5.761.491,52 ton. Berikut merupakan data timbulan sampah menurut provinsi di pulau Jawa tahun 2022.

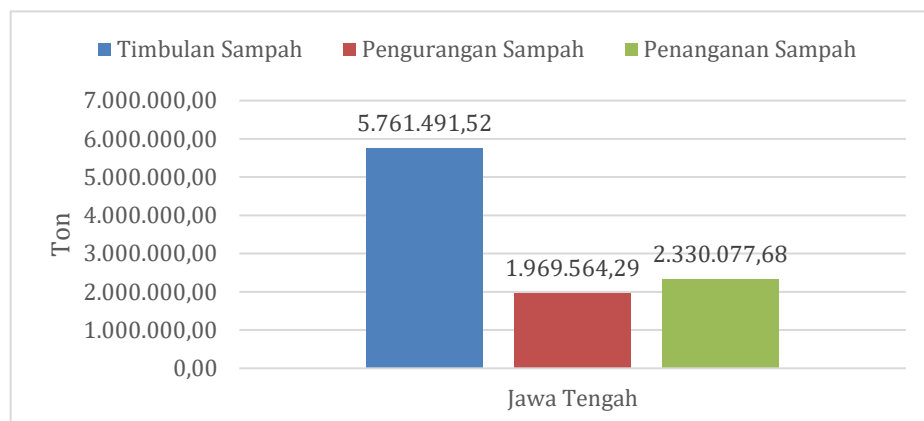


**Gambar 4 Timbulan Sampah Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penghasil sampah terbanyak di pulau Jawa telah mengupayakan langkah pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Langkah tersebut tercermin dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah berupaya secara maksimal untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di wilayahnya, mengingat pencapaian pengelolaan sampah Provinsi Jawa Tengah merupakan yang tertinggi secara nasional, dengan pengurangan sampah mencapai 1.969.564,29 ton dan penanganan sampah mencapai 2.330.077,68 ton, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 5 Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**



Sumber: SIPSN diolah, 2023

Mengacu pada Jakstrada yang dijalankan dalam rentang waktu 2018-2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% hingga tahun 2025, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berikut merupakan tabel data timbulan sampah tahunan menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022.

**Tabel 1 Timbulan Sampah Tahunan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022**

No.	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tahunan (ton)			
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Cilacap	333.228,30	343.019,17	344.409,04	347.055,78
2	Kabupaten Banyumas	N/A*	N/A*	195.357,75	195.964,49
3	Kabupaten Purbalingga	N/A*	N/A*	184.585,06	186.120,80
4	Kabupaten Banjarnegara	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
5	Kabupaten Kebumen	148.386,62	N/A*	N/A*	169.013,40
6	Kabupaten Purworejo	104.874,14	105.146,86	105.420,18	105.694,22
7	Kabupaten Wonosobo	115.411,69	128.352,10	132.496,46	133.682,56
8	Kabupaten Magelang	N/A*	248.530,33	248.800,43	N/A*
9	Kabupaten Boyolali	97.052,73	105.094,61	106.159,34	106.781,29
10	Kabupaten Klaten	128.660,97	N/A*	215.458,83	234.703,44
11	Kabupaten Sukoharjo	133.536,71	132.863,50	131.200,56	132.101,09
12	Kabupaten Wonogiri	159.359,58	159.663,85	160.369,61	126.917,85
13	Kabupaten Karanganyar	N/A*	N/A*	132.071,89	137.065,97
14	Kabupaten Sragen	194.447,69	195.023,44	213.952,27	215.417,38
15	Kabupaten Grobogan	269.785,74	N/A*	N/A*	310.021,75
16	Kabupaten Blora	N/A*	135.568,25	82.801,58	139.811,75
17	Kabupaten Rembang	83.544,12	86.905,62	89.666,36	92.026,00
18	Kabupaten Pati	182.981,65	239.060,58	241.664,31	246.223,89
19	Kabupaten Kudus	159.083,24	160.924,12	N/A*	163.578,95
20	Kabupaten Jepara	251.072,20	254.418,30	146.028,40	150.516,42
21	Kabupaten Demak	N/A*	N/A*	263.666,36	263.666,36

No.	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tahunan (ton)			
		2019	2020	2021	2022
22	Kabupaten Semarang	192.320,00	194.690,09	192.189,00	193.421,53
23	Kabupaten Temanggung	N/A*	181.143,80	182.562,96	146.050,37
24	Kabupaten Kendal	147.743,09	148.701,73	N/A*	149.652,92
25	Kabupaten Batang	84.159,84	87.788,12	118.317,38	207.055,41
26	Kabupaten Pekalongan	N/A*	N/A*	141.447,87	N/A*
27	Kabupaten Pemalang	142.657,91	142.970,65	214.837,39	216.694,51
28	Kabupaten Tegal	N/A*	371.778,31	244.819,49	306.466,23
29	Kabupaten Brebes	330.160,02	361.123,52	358.865,26	366.937,60
30	Kota Magelang	31.168,96	32.709,11	29.447,93	29.384,62
31	Kota Surakarta	N/A*	N/A*	N/A*	137.345,45
32	Kota Salatiga	N/A*	41.620,01	40.969,24	41.668,28
33	Kota Semarang	456.873,35	466.010,79	430.749,75	431.085,22
34	Kota Pekalongan	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
35	Kota Tegal	N/A*	N/A*	73.573,52	79.365,97

\*) Keterangan N/A (*not applicable, not answer, not available*) berarti tidak ada nilai yang tersedia.

Sumber: Hasil Data Diolah<sup>2</sup>, 2023

Berdasarkan tabel data tersebut, dapat diketahui bahwa Kabupaten Banyumas sepanjang tahun 2021-2022 masih mengalami peningkatan timbulan sampah yang sebelumnya 195.357,75 ton/ tahun menjadi 195.964,49 ton/ tahun. Sama seperti Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas juga memiliki permasalahan sampah yang kompleks dimana jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas sebanyak 1.776.918 ribu jiwa penduduk (BPS, Sensus Penduduk 2020) pada tahun 2022 menghasilkan timbulan sampah sebanyak 195.964,49 ton/ tahun.

<sup>2</sup> SIPSAN, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>



Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Pasal 9 kemudian menjelaskan mengenai wewenang pemerintah kabupaten/ kota dalam menjalankan tugas pengelolaan sampah. Pada dasarnya permasalahan terkait sampah bersifat multi dimensi, tidak terbatas hanya pada aspek teknis dan struktural semata. Sebagai gantinya, masalah sampah juga melibatkan dimensi politik, sosial, dan budaya. Dengan demikian, penanganan sampah memerlukan pendekatan holistik yang memperhatikan semua aspek tersebut agar dapat berhasil secara efektif.

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata tergantung pada peran pemerintah saja. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses tersebut, karena pada akhirnya, hasil dari pembangunan akan berdampak langsung pada masyarakat sebagai penerima manfaatnya. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 12, Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 28.

Inti dari penekanan pasal tersebut adalah setiap individu atau masyarakat diwajibkan untuk mengurangi dan menangani sampah berdasarkan aspek lingkungan mengingat pengelolaan sampah tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah melainkan masyarakat juga bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan sampah produk yang dapat didaur ulang.

Peran masyarakat tersebut belum berjalan optimal di Kabupaten Banyumas mengingat tingkat sampah yang didaur ulang masyarakat masih rendah dimana pada tahun 2020 hanya sebesar 25,301.52 ton/ tahun. Aulia et al. (2022) menemukan bahwa meskipun partisipasi masyarakat di Desa Purwokerto Wetan masih rendah, namun dalam hal pembayaran iuran atau retribusi pengolahan sampah, warga tetap aktif membayarkannya sesuai dengan kesepakatan bersama KSM terkait. Sejalan dengan pernyataan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ketika dilakukan wawancara pada tanggal 9 Oktober 2023.

“Awal mula kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat, terus ada pro-kontra di sana. Ada yang bilang ‘wah saya sudah bayar, ngapain saya memilah sampah?’. Ada orang yang kaya gitu kan. Terus kendala-kendala orang yang masih awam dengan pengolahan sampah. Jadi lebih ke pemberdayaan masyarakat, kami masih menjadi kendala.”

Pemberdayaan masyarakat merupakan pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan pengelolaan terhadap lingkungan. Studi yang dilakukan oleh Rahajuni (2018) sebagaimana diulas dalam penelitian Putranto et al. (2022) menyatakan bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Banyumas tidak memiliki lahan untuk pengelolaan sampah dan juga kurang menyadari pentingnya tindakan pembuangan sampah dengan benar.

Selain itu, kendala dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari segi manajerial, sebagaimana yang diidentifikasi oleh Widiyanto et al. (2017). Beberapa kendala tersebut antara lain:

1. Potensi masyarakat secara umum cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah;

2. Adanya anggapan di masyarakat bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam hal pembuangan sampah di tempat yang tepat;
4. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang;
5. Keterbatasan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan lahan untuk teknis pengelolaan, seperti penutupan lahan TPA;
6. Jumlah armada atau fasilitas pengangkutan yang kurang memadai menyebabkan sampah terlambat diangkut, yang kemudian dapat menimbulkan bau dan limbah cair (lindi) di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan transfer depo;
7. Pemanfaatan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum optimal;

Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta mengubah sampah menjadi sumber daya yang berpotensi. Setelah mengalami keadaan darurat sampah pada tahun 2018, Kepala Daerah Kabupaten Banyumas mengeluarkan inisiatif yang dikenal sebagai "SUMPAH BERUANG", yang mengusung gagasan "Sulap Sampah Berubah Menjadi Uang". Selain meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengimplementasikan beberapa inovasi, seperti Aplikasi SALINMAS (Sampah Online Banyumas) dan Aplikasi Jeknyong (Ojeke Inyong), serta melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan

sampah. Selain itu, juga dilakukan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah seperti Pusat Daur Ulang (PDU), Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Hanggar, dan Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE).

Meskipun terdapat pemenuhan fasilitas dan inovasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, namun hal tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah secara menyeluruh. Layanan penanganan sampah masih cenderung terpusat di kawasan perkotaan. Meskipun telah diperkenalkan berbagai inovasi seperti aplikasi Salinmas dan Jeknyong, namun manfaatnya belum optimal karena belum semua rumah tangga melakukan pemilahan sampah. Selain itu, masih terdapat volume residu sampah yang relatif besar dan masih terjadi pembuangan sampah liar di beberapa lokasi, yang menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Adanya pro dan kontra dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta masyarakat terhadap pemilahan sampah secara mandiri dari sumbernya juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marwanti & Aji (2020), ada sejumlah hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menerapkan aplikasi Salinmas dan Jeknyong. Mereka mencatat bahwa tantangan dalam penerapan aplikasi Salinmas mencakup biaya operasional, kerjasama dengan lembaga keuangan, pengaduan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan proses pengambilan sampah.

Widiyanto et al. (2017) dalam penelitiannya menyebutkan beberapa permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas, di antaranya:

- a. Volume sampah yang berserakan di penampungan pemukiman menyebabkan bau tidak sedap;
- b. Pengangkutan sampah yang masih mengganggu lalu lintas kendaraan;
- c. Tempat penampungan sampah yang tidak sesuai dengan volume yang sampah yang ada;
- d. Partisipasi dan proses pemilahan sampah oleh warga yang masih belum optimal;
- e. Kebiasaan warga yang masih membuang sampah di sungai;
- f. Tidak adanya informasi tentang teknologi pengelolaan sampah;
- g. Keterbatasan sarana dan prasarana,
- h. Masyarakat dan pemerintah dinilai belum memberikan dukungan secara maksimal;
- i. Kelompok swadaya masyarakat dinilai masih ada yang belum mengetahui pemanfaatan sampah.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas serta data-data pendukung terkait jumlah penduduk, timbulan sampah serta capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa saat ini sampah yang telah didaur ulang baru sekitar 15,49%. Kemudian, belum dipetakan siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas serta perhatian dan kontribusi

lebih lanjut antar pemangku kepentingan terkait jenis peran dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

Oleh karena itu, keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sangat penting karena permasalahan sampah merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan peran serta perhatian dari berbagai pemangku kepentingan. Peran *stakeholder* diperlukan guna mendorong pencapaian sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berjalan optimal menuju “*Zero Waste and Zero Operational Cost*”.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian pada studi ini adalah tentang bagaimana kontribusi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Penelitian akan mengeksplorasi siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, serta bagaimana peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut. Selain itu, penelitian juga akan menggali informasi tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mencapai sistem pengelolaan yang terpadu.

## 1.2 Perumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan sampah merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia tak terkecuali Indonesia sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak baik pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Salah satu target Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah mencapai predikat *Zero Waste* dan memastikan realisasi *Zero Waste and Zero Operational Cost* dapat tercapai.

Dalam rangka mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas dihadapkan dengan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Meningkatnya volume timbulan sampah akibat dari peningkatan jumlah penduduk.
2. Timbulan sampah yang didaur ulang masih rendah akibat dari kurangnya partisipasi masyarakat.
3. Kurangnya pemerataan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi.
4. Cakupan pelayanan pengelolaan sampah masih berpusat di perkotaan dan kurangnya pemerataan pelayanan pengelolaan sampah di setiap kecamatan.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah karena keterbatasan sumber daya seperti sarana dan prasarana.
6. Adanya pro dan kontra dari masyarakat serta KSM mengenai pemilahan sampah dari sumbernya.

7. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya serta pertanyaan penelitian terkait bagaimana peran *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sehingga disusun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana peran masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas?
3. Apa saja faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan peran *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menganalisis peran masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.



3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan peran *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan/ manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan dalam bidang Administrasi Publik, terutama terkait dengan pemahaman tentang konsep dan teori-teori yang telah ada sebelumnya mengenai peran *stakeholders*. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang berguna untuk penelitian lanjutan di masa depan.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

###### 1) Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu serta pengalaman bagi penulis dalam bidang akademis dan penulis dapat mengetahui peran *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

## 2) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan evaluasi hasil dalam perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan sampah serta pemilihan alternatif kebijakan dalam menuntaskan permasalahan sampah baik yang terjadi di masa sekarang ataupun masa yang akan datang.

## 3) Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah agar dapat berjalan lebih optimal melalui analisis peran *stakeholders*.

## 4) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pengetahuan dan informasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah baik melalui pengurangan dan penanganan sampah.

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Tujuan	Landasan Teori	Metode	Hasil
1.	Amanda Natasya Putri, Kismartini, R. Slamet Santoso (2022)	Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Mewujudkan <i>Zero Waste City</i> di Kota Depok (Putri et al., 2022)	Untuk mengidentifikasi <i>stakeholder</i> dan peran <i>stakeholder</i> dalam mewujudkan <i>Zero Waste City</i> di Kota Depok.	Teori Pemetaan <i>Stakeholder</i> menurut Bryson (2003) dan Teori Peran <i>Stakeholder</i> menurut Nugroho dalam Setiawan dan Nurcahyanto (2020)	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	<i>Stakeholder</i> yang termasuk dalam kategori " <i>players</i> " adalah Wali Kota Depok, yang memiliki peran sebagai pencipta kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok juga termasuk sebagai " <i>players</i> " dengan peran sebagai pencipta kebijakan, koordinator, fasilitator, dan pelaksana kebijakan. <i>Stakeholder</i> yang termasuk dalam kategori " <i>subject</i> " adalah Bappeda Kota Depok, yang berperan sebagai koordinator. Dinas Pekerjaan Umum dan

No.	Nama	Judul	Tujuan	Landasan Teori	Metode	Hasil
						<p>Penataan Ruang Kota Depok berperan sebagai fasilitator. Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit berperan sebagai pelaksana kebijakan dan fasilitator.</p> <p><i>Stakeholder</i> yang termasuk dalam kategori "<i>crowd</i>" adalah Kecamatan, Kelurahan, dan RT/RW, yang berperan sebagai pelaksana kebijakan dan fasilitator. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Cabang Kota Depok), Institusi Pendidikan, dan Pelapak masing-masing memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan.</p>
2.	Farih Rizqi Putranto, Tri Yuniningsih, Ida Hayu Dwimawanti (2022)	Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas (Putranto et al., 2022)	Untuk menganalisis dan merekomendasikan alternatif kebijakan dalam pengelolaan sampah di	Teori analisis kebijakan dari Bardach (dalam Tumanggor, 2018)	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan	Kajian ini menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang

No.	Nama	Judul	Tujuan	Landasan Teori	Metode	Hasil
			Kabupaten Banyumas.		pendekatan kualitatif.	berbasis pada sumbernya. Rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah pembangunan hanggar dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan sebagai pendekatan dalam mengelola sampah secara berbasis sumber.
3.	Nuansa Dwika Aulia, Agnes Fitria Widiyanto, Kuswanto, Suratman, Saudin Yuniarno (2022)	Evaluasi Pengelolaan Sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kelompok Swadaya Masyarakat "SAE" Kelurahan Purwokerto Wetan (Aulia et al., 2022)	Untuk mengevaluasi pengelolaan sampah di TPST KSM Sae Desa Purwokerto Wetan	Teori Evaluasi	Metode deskriptif pendekatan kualitatif	1) Dalam aspek kelembagaan, KSM Sae diselenggarakan oleh organisasi masyarakat dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat, bukan oleh entitas swasta atau pengembang. Namun, masih ada kekurangan tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang pengelolaan sampah. 2) Dalam aspek regulasi, sebagian besar

No.	Nama	Judul	Tujuan	Landasan Teori	Metode	Hasil
						<p>responden tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar hukum yang digunakan untuk pembentukan KSM.</p> <p>3) Sistem pembiayaan KSM Sae melibatkan DLH untuk pengadaan perlengkapan, sementara biaya operasional dan pemeliharaan dikelola oleh KSM sendiri melalui kas yang dihasilkan dari iuran pelanggan.</p> <p>4) Dari segi teknik operasional, KSM Sae belum memiliki proses pengolahan sampah menjadi energi daur ulang dan belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengolahan</p>

No.	Nama	Judul	Tujuan	Landasan Teori	Metode	Hasil
						limbah B3 rumah tangga. 5) Partisipasi masyarakat di Desa Purwokerto Wetan masih kurang, namun mereka aktif dalam membayar iuran atau retribusi pengolahan sampah sesuai dengan kesepakatan dengan operator gerobak.
4.	Hana Marlina Isnah Rahmadani Dian Eka Rahmawati (2021)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 (Rahmadani & Rahmawati, 2021)	Untuk memahami mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Srayan Makarya	Partisipasi Masyarakat	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Bank Sampah Srayan Makarya telah melaksanakan kegiatannya dengan efektif, termasuk dalam pemilahan sampah sejak sumbernya, pengelolaan setoran sampah, dan pencatatan tabungan nasabah. Namun, meskipun demikian, partisipasi masyarakat cenderung kurang dalam beberapa kegiatan karena kegiatan rutin hanya

No.	Nama	Judul	Tujuan	Landasan Teori	Metode	Hasil
						dilakukan sekali seminggu, sementara kegiatan lainnya sering kali ditangani oleh pihak eksternal.
5.	Agnes Fitria Widiyanto, Oktafiani Catur Pratiwi, dan Saudin Yuniarno (2017)	Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas (Widiyanto et al., 2017)	Untuk mempelajari, merancang, menemukan, dan menerapkan pola pengelolaan sampah rumah tangga yang melibatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan.	Evaluasi Kebijakan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis data.	Permasalahan sampah akan semakin meruncing seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Kegiatan pengelolaan sampah menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuangan sampah yang tidak teratur, serta kendala terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
6	Kismartini, Muh. Yusuf (2015)	<i>Stakeholder Analysis: Managing Coastal Policy Implementation in Rembang District</i> (Yusuf, 2015)	Untuk mengenali <i>stakeholder</i> dan fungsi mereka dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang.	<i>Stakeholders</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Pemangku kepentingan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang dibagi menjadi dua kelompok: utama dan pendukung. Salah satu pemangku kepentingan utama yang memiliki pengaruh signifikan



No.	Nama	Judul	Tujuan	Landasan Teori	Metode	Hasil
						terhadap masalah, kebutuhan, dan perhatian terkait pengelolaan wilayah pesisir adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.
7.	Tri Yuniningsih, Ida Hayu Dwimawanti, Dyah Lituhayu (2023)	<i>The Role of Aktors in Tourism Development in Tanjungpinang City, Riau Islands Province</i> (Yuniningsih et al., 2023)	Untuk memahami peran para pelaku dalam pengembangan pariwisata di Kota Tanjungpinang dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	<i>Stakeholders</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Ada 45 pelaku yang terlibat, yang dibagi menjadi lima peran. Pelaku yang berperan sebagai pembuat kebijakan, koordinator, dan akselerator telah menjalankan perannya dengan efektif. Namun, beberapa pelaku yang belum berperan secara optimal adalah pelaku fasilitator dan pelaksana.
8.	Muhammad Bibin, Yon Vitner, Zulhamsyah Imran (2018)	<i>Analysis of Stakeholder in the Development of Labombo Beach Sustainable Town in Palopo City</i> (Bibin et al., 2018)	Untuk memahami tingkat partisipasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan pariwisata bahari di Pantai Labombo.	<i>Stakeholder</i>	Penelitian ini menggunakan dua (2) pendekatan analisis, yaitu analisis <i>stakeholder</i> kualitatif dan	Dinas Pariwisata Kota Palopo memiliki peran penting sebagai lembaga yang diberi mandat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata di Kota Palopo. Mereka juga merupakan

No.	Nama	Judul	Tujuan	Landasan Teori	Metode	Hasil
					<i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	salah satu pemain kunci yang dapat secara aktif melibatkan para pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan mengevaluasi strategi pengembangan pariwisata bahari di Pantai Labombo.
9.	Ni Luh Putu Agustini Karta, Ida Ketut Kusumawijaya, Victor Babu Kappola (2020)	<i>The Role and Contributions of Stakeholders in Village Tourism Brand Management in Bali and India</i> (Karta et al., 2020)	Untuk menganalisis peran dan kontribusi pemangku kepentingan dalam pengelolaan <i>brand</i> desa wisata di Bali dan di India.	Peran <i>Stakeholder</i>	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif komparatif dilakukan di desa wisata di Bali dan desa wisata di Andra Pradesh, India.	Para pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam manajemen <i>brand</i> desa wisata untuk dapat membangun citra yang baik.
10.	Agnes Fitria Widiyanto, Suratman, Nisrina Alifah, Tri Murniati,	<i>Knowledge and Practice in Household Waste Management</i> (Widiyanto et al., 2019)	Untuk mengevaluasi dampak dari intervensi dan pelatihan dalam	Pemberdayaan Masyarakat	Metode Kuantitatif dengan penelitian eksperimen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam skor pengetahuan dan praktik

No.	Nama	Judul	Tujuan	Landasan Teori	Metode	Hasil
	Oktafiani Catur Pratiwi (2019)		manajemen sampah terhadap perubahan dalam pengetahuan dan praktik pengelolaan sampah di rumah tangga.		semu menggunakan <i>one group of pre and post test design</i>	pengelolaan sampah rumah tangga setelah dilakukan intervensi (p-value = 0,001; p-value < 0,05). Secara ringkas, intervensi ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik pengelolaan sampah rumah tangga.

Sumber: Hasil Data Diolah, 2023

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori *stakeholder* yang mengidentifikasi *stakeholder* menggunakan model pentahelix ABCGM (Akademisi, Bisnis, *Community*, *Government*, Media Massa) untuk menentukan *stakeholder* yang terlibat. Sedangkan, untuk teori peran *stakeholder*, peneliti menggunakan teori peran *stakeholder* milik Bryson, Crosby dan Stone dalam *The Design and Implementation of Cross-Sektor Collaborations* (2015). Adapun teori milik Michael Hill dalam *The Publik Policy Process* (2021) penulis gunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peran *stakeholder* dalam pelaksanaan program. Berdasarkan sepuluh (10) artikel yang telah dipaparkan sebelumnya, memiliki fokus yang sama yaitu mengenai peran *stakeholder* dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Berdasarkan *literatur review* diatas, dapat diketahui bahwa belum ada penelitian terkait peran *stakeholders* yang mengambil lokus serupa dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu, berdasarkan pencarian literatur terkait pengelolaan sampah di atas, penelitian lebih fokus pada keterlibatan dan peran *stakeholder* serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program saja. Sejauh ini belum ada penelitian yang meneliti terkait peran *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait peran *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas belum pernah dilakukan sebelumnya.

### 1.5.2 Administrasi Publik

Sellang (2016) menjelaskan ruang lingkup administrasi mencakup bagaimana individu mengatur diri mereka secara kolektif sebagai bagian dari entitas publik, dengan masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah-masalah publik demi mencapai tujuan bersama. Administrasi publik mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu yang bertindak atas nama publik, sesuai dengan kewenangan yang sah, dan tindakan mereka memiliki dampak pada anggota masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok.

Administrasi publik dapat dianggap sebagai gabungan dari keterampilan artistik dan pengetahuan ilmiah yang diterapkan untuk mengelola urusan publik serta menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, tujuan dari administrasi publik adalah untuk mengatasi masalah-masalah di ranah publik dengan melakukan perbaikan atau peningkatan, khususnya dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Administrasi publik bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan tanggung jawab kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, administrasi publik bertujuan untuk mengukuhkan praktik manajerial agar dapat melaksanakan kegiatan dengan cara yang efektif, efisien, dan rasional.

Menurut Henry (2004) sebagaimana dikutip dalam (Ahmad, 2015), paradigma administrasi publik dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Paradigma pertama (1900-1926) adalah periode dikotomi politik dan administrasi. Paradigma ini menekankan pada birokrasi pemerintah, namun kurang dalam menguraikan fokus atau metode pengembangan administrasi publik secara rinci.
- 2) Paradigma kedua (1927-1937) dikenal sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi yang berfokus pada administrasi publik, diwujudkan dalam POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*) yang dianggap bersifat universal.
- 3) Paradigma ketiga (1950-1970) disebut paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. *Locus*-nya adalah birokrasi pemerintahan sebagai penekanan pada paradigma ini.
- 4) Paradigma keempat (1956-1970) adalah administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan sebagainya menjadi *fokus* pada paradigma ini.

5) Paradigma kelima (1970-sekarang) merupakan paradigma terakhir yang disebut sebagai administrasi publik. Fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Menurut Sellang (2016), ruang lingkup administrasi publik mencakup; (1) kebijakan publik; (2) birokrasi publik; (3) manajemen publik; (4) kepemimpinan; (5) pelayanan publik; (6) administrasi kepegawaian; (7) kinerja; dan (8) etika administrasi publik.

Lebih lanjut dalam mempertimbangkan elemen-elemen penting dalam literatur administrasi publik, menurut Keban (2008) penting untuk memahami setidaknya 6 (enam) dimensi strategis, yaitu: 1) Dimensi kebijakan; 2) Dimensi struktur organisasi; 3) Dimensi manajemen; 4) Dimensi etika; 5) Dimensi lingkungan; dan 6) Dimensi akuntabilitas kinerja.

### **1.5.3 Kebijakan Publik**

Menurut Fredrich yang dikutip dalam Agustino (2020), kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara menurut Anderson yang dikutip dalam Agustino (2020), kebijakan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok aktor yang terkait dengan maksud tertentu.

Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa kebijakan publik berkaitan erat dengan proses serangkaian tindakan yang dijalankan oleh individu atau kelompok aktor kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Kaitannya dengan hal tersebut, dalam penelitian ini berguna untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dan perannya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

Michael Hill dalam bukunya yang berjudul “*The Publik Policy Process*” menguraikan konsep dari proses kebijakan publik (*publik policy process*) dimana konsep ini mengacu pada serangkaian Langkah-langkah dan tahapan yang terjadi dalam pembentukan, perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Adapun konsep “*The Publik Policy Process*” menurut Michael Hill diantaranya (Hill & Varone, 2021):

1. *Agenda Setting*

Tahap ini melibatkan pengidentifikasian isu-isu yang memerlukan perhatian dan tindakan dari pemerintah atau lembaga publik. Isu-isu tersebut bisa muncul dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, kelompok kepentingan dan pemimpin politik.

2. *Policy Formulation*

Setelah isu diidentifikasi, tahap ini melibatkan pembentukan proses kebijakan atau solusi untuk mengatasi isu tersebut. Proses ini melibatkan analisis masalah, identifikasi opsi kebijakan, serta pembuatan rencana tindakan.



### 3. *Policy Adoption*

Pada tahap ini, kebijakan yang diusulkan diputuskan untuk diadopsi oleh pemerintah atau lembaga terkait. Ini melibatkan proses keputusan politik dan legislasi.

### 4. *Policy Implementation*

Implementasi adalah tahap dimana kebijakan dijalankan dalam praktik. Ini melibatkan mengalokasikan sumber daya, mengkoordinasikan tindakan, dan memastikan bahwa kebijakan diterapkan sesuai rencana.

### 5. *Policy Evaluation*

Setelah kebijakan dijalankan, evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap masalah yang ingin diatasi. evaluasi ini dapat menyebabkan perubahan dalam kebijakan, jika diperlukan.

### 6. *Policy Termination*

Pada suatu saat, kebijakan mungkin tidak lagi diperlukan atau efektif, dan tahap terminasi terjadi. Ini melibatkan perubahan, penggantian, atau pencabutan kebijakan.

#### 1.5.4 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut van Meter dan van Horn (Winarno, 2012), proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat/ kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada kebijakan. Sedangkan, menurut Mazmanian dan Sebatier (Agustino, 2020) implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan dengan mengidentifikasi masalah, tujuan yang ingin dicapai dan cara mengatur implementasi.

Terdapat beberapa model implementasi kebijakan untuk memahami proses pelaksanaan kebijakan. Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Nugroho, 2020) kinerja kebijakan dipengaruhi variable-variabel independen yang saling terkait. Adapun variabel yang mempengaruhi kinerja dan implementasi kebijakan yaitu :

a. Standar dan sasaran kebijakan

Diukur dengan realitas keberhasilan ukuran dan tujuannya. Saat ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (*utopis*) maka kebijakan akan sulit untuk direalisasikan.

b. Sumber daya

Pelaksanaan kebijakan bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

c. Karakteristik agen pelaksana

Perlu adanya penggambaran kegiatan secara umum dan status bagian agar mengetahui tugas dan kewenangannya.

- d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana

Implementasi akan berjalan efektif jika ukuran dan tujuan dipahami oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

- e. Sikap para pelaksana

Sikap implementor berpengaruh pada kegiatan dimana jika pelaksana kebijakan setuju maka akan melaksanakannya dengan senang hati, tetapi apabila berbeda pandangan maka pelaksanaannya akan mengalami banyak masalah.

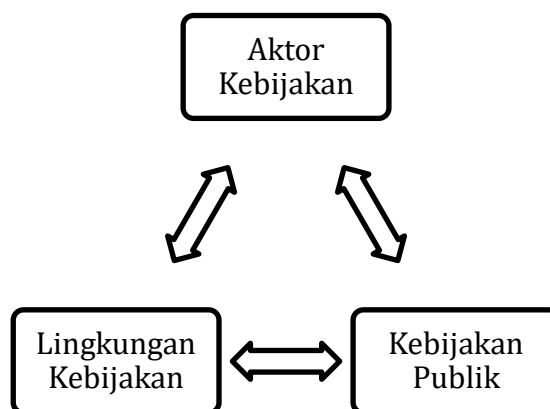
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan luar memiliki pengaruh yang penting pada kebijakan. Hal ini bergantung pada dukungan positif maupun negatif lingkungan eksternal tersebut.

### **1.5.5 Stakeholders**

Menurut Dunn (1994) dalam Ayuningtyas (2018), sistem kebijakan mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut digambarkan dalam gambar berikut.

**Gambar 6 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan<sup>3</sup>**



Gambar di atas menjelaskan bahwa sebuah sistem kebijakan merupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait, dan bukan komponen yang berdiri sendiri.

*Stakeholder* atau aktor kebijakan adalah semua pihak, baik secara individu maupun dalam kelompok, yang memiliki potensi untuk dipengaruhi oleh atau memengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan dari suatu kegiatan (Kismartini et al., 2019). Brown et al. (dalam Kismartini et al., 2014) menjelaskan bahwa analisis *stakeholder* merupakan sistem pengumpulan informasi dari individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, serta proses pengelompokan informasi dan penilaian terhadap kemungkinan konflik antara berbagai kelompok kepentingan terkait dengan area dimana adanya pertukaran (*trade-off*) akan dilakukan.

<sup>3</sup> William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994: 65

Teori *stakeholder* muncul sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan tersebut. Gagasan bahwa perusahaan memiliki pemangku kepentingan telah menjadi subjek yang sering diperbincangkan dalam literatur manajemen, baik di kalangan akademisi maupun praktisi bisnis.

Teori *stakeholder* menekankan bahwa perusahaan tidak hanya berfungsi untuk kepentingan internalnya sendiri, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terlibat dengan perusahaan tersebut. Pemangku kepentingan tersebut mencakup pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lainnya. Oleh karena itu, menurut penelitian Chariri & Ghozali (2007), kesuksesan dan keberlanjutan suatu perusahaan sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan tersebut kepada perusahaan.

Budimanta et al. (2008) menguraikan bahwa ada dua pendekatan dalam memahami hubungan dengan pemangku kepentingan, yaitu *Old-corporate relation* dan *New-corporate relation*. Pendekatan *Old-corporate relation* menekankan pada pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, menunjukkan kurangnya integrasi antara berbagai fungsi perusahaan. Sebaliknya, pendekatan *New-corporate relation* menyoroti kolaborasi antara perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan, di mana

perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai entitas yang beroperasi sendiri di dalam masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas.

Aktor kebijakan atau *stakeholder* kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor dalam kebijakan publik paling tidak dapat diidentifikasi dalam 3 jenis lingkungan kebijakan, yaitu:

a. Lokal

Lingkup kebijakan bersifat lokal atau ada di tingkat daerah, yang sifatnya teknis dan erat kaitannya dengan isu-isu lokal, kebijakannya dapat berupa turunan (teknis atau implementatif) dari kebijakan yang ada di atasnya (makro).

b. Nasional

Lingkup kebijakannya secara nasional dan berupa penggarisan masalah-masalah makro strategis guna mencapai tujuan nasional, dalam situasi dan kondisi tertentu.

c. Internasional

Lingkungan kebijakan yang luas, yang memiliki dampak terhadap lingkungan internasional (antar-negara). Isu yang diangkat berupa isu-isu global.

Menurut Winarno (2012), aktor kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni para pemeran resmi dan para pemeran tidak resmi. Adapun yang termasuk ke dalam pemeran resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Sedangkan, yang termasuk ke dalam kelompok pemeran tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu.

Moore (1995) dalam Yakin et al. (2013) membagi aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik yaitu, aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat (*civil society*). Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik.

#### **1.5.6 Identifikasi *Stakeholder***

Menurut Kismartini dan Yusuf (2015) dalam penelitian yang dikutip oleh Putri et al. (2022), analisis *stakeholder* merupakan proses yang terstruktur untuk memperoleh dan menganalisis pemangku kepentingan, termasuk individu, kelompok dan organisasi. Kismartini et al. (2019) mengategorikan *stakeholders* menjadi tiga jenis yakni pemerintah atau negara (*state*), masyarakat (*society*) dan masyarakat ekonomi (*private*).

Dalam penelitian Handayani & Warsono (2017), *stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok menurut *Stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. *Stakeholders* primer

*Stakeholders* primer adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang signifikan harus terlibat sepenuhnya dalam setiap tahapan kegiatan.

b. *Stakeholders* kunci

*Stakeholder* kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan hukum dalam pengambilan keputusan.

c. *Stakeholders* sekunder atau pendukung

*Stakeholders* pendukung adalah pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam suatu rencana tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan, meliputi para investor, pihak swasta, LSM, dan peneliti.

Teknik pemetaan *stakeholder* dikemukakan oleh Bryson (2003) dalam (Putri et al., 2022) yakni analisis *Power* (kekuatan) dan *Interest* (Kepentingan). Teknik ini menyusun pemangku kepentingan pada matriks dua kali dua (2x2) dimana dimensinya adalah kepentingan pemangku kepentingan dalam organisasi atau permasalahan yang dihadapi dan dimensi kekuatan atau pengaruh yang dapat mempengaruhi masa depan organisasi atau permasalahan.

Tahap pertama dalam menganalisis *stakeholders* adalah menetapkan “pengaruh” dan “kepentingan” berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gardner et al. (1986), Reed et et al. (2009), dan Thompson (2011), sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian oleh (Wakka, 2014):



a. Subyek (*Subjects*).

*Stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah.

b. Pemain Kunci (*Key Players*).

*Stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.

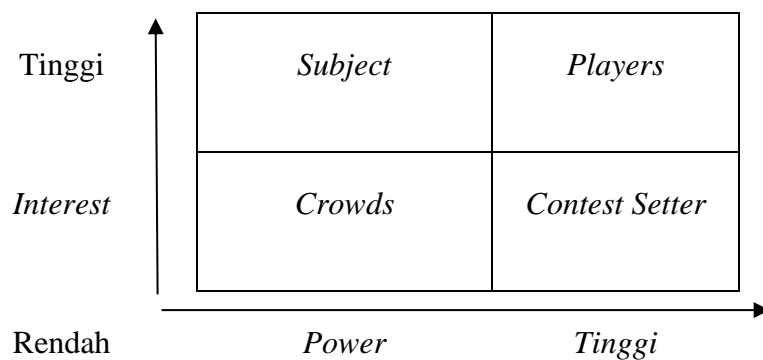
c. Pengikut Lain (*Crowd*).

*Stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.

d. Pendukung (*Contest setters*).

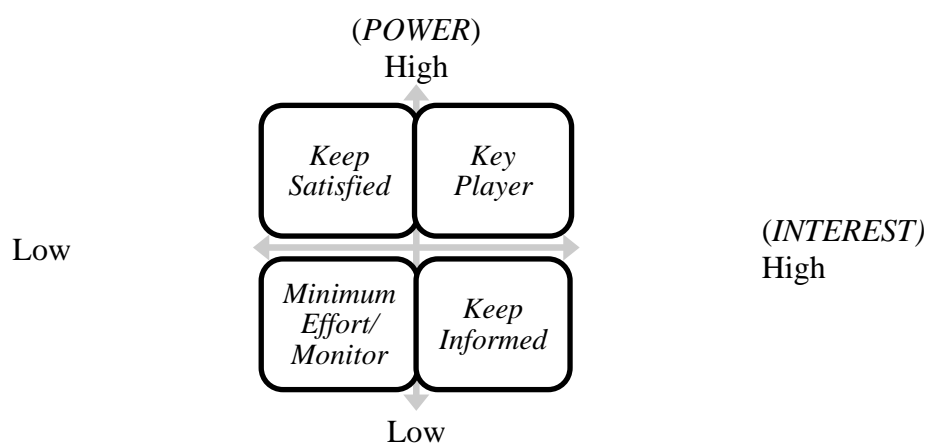
*Stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.

Berikut merupakan gambaran dari pemetaan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya menurut Bryson (2003) dalam (Putri et al., 2022).



**Gambar 7 Pemetaan *Stakeholder* Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingan Menurut Bryson**

Menurut Mendelow dalam Nurlaila & Solihat (2020), pengaruh dan kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan dapat diidentifikasi melalui survey. Setiap pemangku kepentingan memiliki tingkat nilai yang beragam. Mendelow mengklasifikasikannya berdasarkan nilai terendah hingga tinggi dan membaginya menjadi *Keep Satisfied* pada kuadran pertama, *Key Players* pada kuadran kedua, *Keep Informed* pada kuadran ketiga, dan *Minimum Effort/ Monitor* pada kuadran keempat sebagaimana gambar berikut.



**Gambar 8 Pemetaan Stakeholder Menggunakan Mendelow's Matrix**

Konsep klasifikasi *stakeholder* berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan dikenal sebagai “*Stakeholder Power-Interest Grid*” atau ‘*Mendelow's Matrix*’. Dalam Mendelow's Matrix, *stakeholder power* biasanya dibedakan menjadi dua kategori:

- a. *High Power*, yakni *stakeholder* dengan kekuatan atau pengaruh yang signifikan. Mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan hasil inisiatif. Dalam konteks ini, kekuatan tidak hanya merujuk pada kekuatan fisik, tetapi juga pada faktor-faktor seperti status, otoritas, akses ke sumber daya, atau dukungan dari kelompok masyarakat.
- b. *Low Power*, yakni *stakeholder* dengan pengaruh yang lebih rendah atau minim. Mereka mungkin tidak memiliki kapasitas besar untuk mempengaruhi keputusan atau hasil inisiatif.

Konsep ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan *stakeholder* berdasarkan sejauh mana mereka memiliki pengaruh terhadap suatu inisiatif (kekuatan) dan sejauh mana mereka memiliki kepentingan terhadap inisiatif tersebut. Matriks ini umumnya dibagi menjadi empat kuadran yang masing-masing mewakili kategori *stakeholder* yang berbeda:

- a. *High Power, High Interest (Key Players)*

*Stakeholder* dalam kuadran ini memiliki tingkat kekuasaan yang tinggi dan juga memiliki kepentingan yang tinggi terhadap inisiatif.

- b. *High Power, Low Interest (Keep Satisfied)*

*Stakeholder* dalam kuadran ini memiliki kekuasaan yang tinggi tetapi kepentingan yang rendah terhadap inisiatif.

c. *Low Power, High Interest (Keep Informed)*

*Stakeholder* dalam kuadran ini memiliki kekuasaan yang rendah tetapi kepentingan yang tinggi terhadap inisiatif.

d. *Low Power, Low Interest (Minimum Effort/Monitor)*

*Stakeholder* dalam kuadran ini memiliki tingkat kekuasaan yang rendah dan juga memiliki kepentingan yang rendah terhadap inisiatif.

Michel Calnon, Bruno Latour dan John Law pada tahun 1980-an (Purba et al. dalam (Yuniningsih et al., 2023) mengemukakan bahwa identifikasi *stakeholders* dapat dibedakan berdasarkan jumlah aktor yang terlibat dalam jejaring tersebut, dengan masing-masing memiliki peran dan tugasnya sendiri. Terdapat tiga jenis jejaring yang dikenal yaitu Triple Helix (melibatkan Universitas, Industri, dan Pemerintah), Quadruple Helix (melibatkan Universitas, Industri, Pemerintah, dan Masyarakat Madani), dan Penta Helix (melibatkan Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media Massa), sering disingkat sebagai ABCGM. Ini menunjukkan kerjasama lintas sektor yang semakin kompleks dalam pengembangan suatu inovasi atau proyek.

Kolaborasi Penta Helix merupakan kerja sama antara lima sektor atau bidang, yaitu Academic, Business, Community, Government, dan Media, yang dikenal sebagai ABCGM (Yunas, 2019). Unsur Penta Helix awalnya berasal dari konsep Triple Helix yang terdiri dari akademisi, sektor bisnis, dan pemerintah, kemudian ditambahkan satu unsur lagi, yaitu Civil Society (Komunitas), sehingga menjadi Quadruple Helix. Quadruple Helix kemudian diperluas dengan penambahan satu unsur lagi, yaitu Media. Dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, baik media konvensional maupun media sosial memegang peranan penting. Walaupun demikian, keduanya tetap berfungsi secara independen atau tidak secara langsung dipengaruhi oleh elemen-elemen lainnya dalam melaksanakan peran atau fungsinya (Satari & Asad, 2016).

### **1.5.7 Peran *Stakeholder***

*Stakeholder* merujuk kepada individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, keterlibatan, dan pengaruh terhadap suatu kegiatan atau program pembangunan (Hetifah dalam Ginting et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Longart dalam (Destiana et al., 2020) menunjukkan bahwa program yang melibatkan berbagai *stakeholder* dengan tujuan dan peran yang beragam memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen *stakeholders* yang efektif.

Peran *stakeholder* dalam hal ini sektor publik yang diwakili oleh pemerintah baik di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki peranan yang sangat efektif dalam mengoptimalkan pengembangan program atau kebijakan. Menurut Gede Diva (2009) dalam Anam (2019) menyebutkan bahwa dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Apabila UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Demikian juga halnya dengan peran pemerintah Kabupaten Banyumas melalui instansi-intansi resmi dibawahnya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sebagai fasilitator.

b. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif.

c. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam mengidentifikasi peran *stakeholder* dalam administrasi publik adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Bryson, Crosby, dan Stone dalam buku mereka yang berjudul “*The Design and Implementation of Cross-Sektor Collaborations*” dimana di dalam buku tersebut, mereka mengidentifikasi empat peran *stakeholder* utama dalam kerja sama lintas sektor, yang dapat diadaptasi ke dalam konteks administrasi publik, yakni *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementor*, dan *accelerator* (Bryson et al., 2015).

Berdasarkan temuan yang disampaikan oleh Bryson et. al, Nugroho (2020) menegaskan peran *stakeholder* dalam program pengembangan pariwisata, yang meliputi: 1) Policy Creator, 2) Koordinator, 3) Fasilitator, 4) Implementor, dan 5) Akselerator. Ini merujuk pada informasi yang dikutip oleh Nugroho (2020) dari hasil penelitian Ali dan kawan-kawan tentang klasifikasi *stakeholder* dalam program pembangunan berdasarkan peran masing-masing (Agung, 2016).

Menurut Nugroho dalam penelitian yang dikutip oleh Setiawan & Nurcahyanto (2020), peran *stakeholder* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Policy creator*, merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan atau program.
- b. Koordinator, merupakan pihak yang bertugas untuk mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan kebijakan atau program.
- c. Fasilitator, merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan memenuhi kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran.
- d. Implementor, merupakan pihak yang melakukan tindakan nyata dalam pelaksanaan kebijakan atau program.
- e. Akselerator, merupakan pihak yang berperan dalam mempercepat proses pelaksanaan program sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.



### 1.5.8 Faktor Keberhasilan Peran *Stakeholder*

Michael Hill dalam bukunya *The Publik Policy Process* mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Berikut adalah faktor-faktor tersebut menurut pandangan Hill (Hill & Varone, 2021):

#### 1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Kebijakan

##### a. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya, termasuk dana, personel, teknologi, dan infrastruktur, sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

##### b. Dukungan Politik

Dukungan dari para pemimpin politik, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan ini, implementasi bisa menjadi lebih sulit.

##### c. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dan kelompok terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bisa meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan tersebut

d. Koordinasi Antar Instansi

Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi atau departemen pemerintah dapat mengurangi hambatan administratif dan memastikan bahwa pelaksanaan berjalan lancar.

e. Pemahaman yang Jelas

Setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan harus memahami dengan jelas tujuan, prosedur, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kebijakan.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan

a. Perubahan Prioritas Politik

Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau pergeseran prioritas politik bisa mengganggu pelaksanaan kebijakan yang sudah direncanakan.

b. Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat

Jika kebijakan tidak memenuhi kebutuhan atau tuntutan masyarakat, pelaksanaannya bisa dihadapkan pada hambatan dan resistensi

c. Birokrasi yang Rumit

Terlalu banyak prosedur birokratik atau hambatan administratif dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan.

d. Konflik Kepentingan

Adanya konflik di antara berbagai kelompok kepentingan atau sektor bisa mengganggu pelaksanaan kebijakan

e. Kurangnya Dukungan Politik

Tanpa dukungan politik yang kuat, pelaksanaan kebijakan bisa menghadapi hambatan dalam proses perundingan dan pelaksanaan.

f. Ketidakpastian Lingkungan

Faktor-faktor eksternal yang tidak terduga, seperti perubahan ekonomi atau kondisi alam, bisa memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

g. Resistensi Birokrasi

Birokrasi atau aparatur pemerintah yang resisten terhadap perubahan bisa menghambat pelaksanaan kebijakan.

### **1.5.9 Pengelolaan Sampah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi atau sejenisnya, termasuk kotoran seperti daun atau kertas. Namun, dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa dari kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat.

Menurut Nugroho (dalam Nurfakhirah et al., 2021), pengelolaan berasal dari kata 'Kelola' dan merujuk pada pengurusan dan penanganan suatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan juga bisa merujuk pada proses menjalankan kegiatan khusus dengan memobilisasi tenaga orang lain. Selain itu, pengelolaan mencakup upaya merumuskan tujuan organisasi. Secara keseluruhan, pengelolaan adalah proses yang melibatkan pengawasan terhadap semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan Sampah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah merujuk pada upaya untuk mengurangi jumlah dan berat sampah yang dihasilkan. Sementara itu, penanganan sampah mencakup kegiatan seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.

Pengurangan sampah meliputi kegiatan yang menerapkan konsep 3R yakni pembatasan timbulan sampah (*reduce*), daur ulang sampah (*recycle*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*). *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) adalah kegiatan pembatasan, penggunaan ulang dan pendauran ulang.

Kegiatan penanganan sampah mencakup beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berikut:

1. Pemilahan jenis sampah yaitu proses pemisahan sampah berdasarkan jenisnya, seperti organik, non-organik, dan lain-lain.
2. Pengumpulan yaitu pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Pengangkutan yaitu membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
4. Pengolahan yaitu mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah melalui berbagai proses pengolahan.
5. Pemrosesan akhir yaitu pengambilan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Prinsip *zero waste* adalah pendekatan dalam pengelolaan sampah yang berfokus pada praktik daur ulang (*recycle*), dimana proses pengelolaan sampah melibatkan pemilihan, pengomposan dan pengumpulan sampah yang dapat dijual. Menurut Paul Connet sebagaimana yang dikutip dalam Musa (2022), konsep *zero waste* adalah menolak penggunaan *incinerator*, dan lahan pembuangan sampah (*landfill*), serta mengubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah secara sembarangan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan komunitas yang berkelanjutan dengan

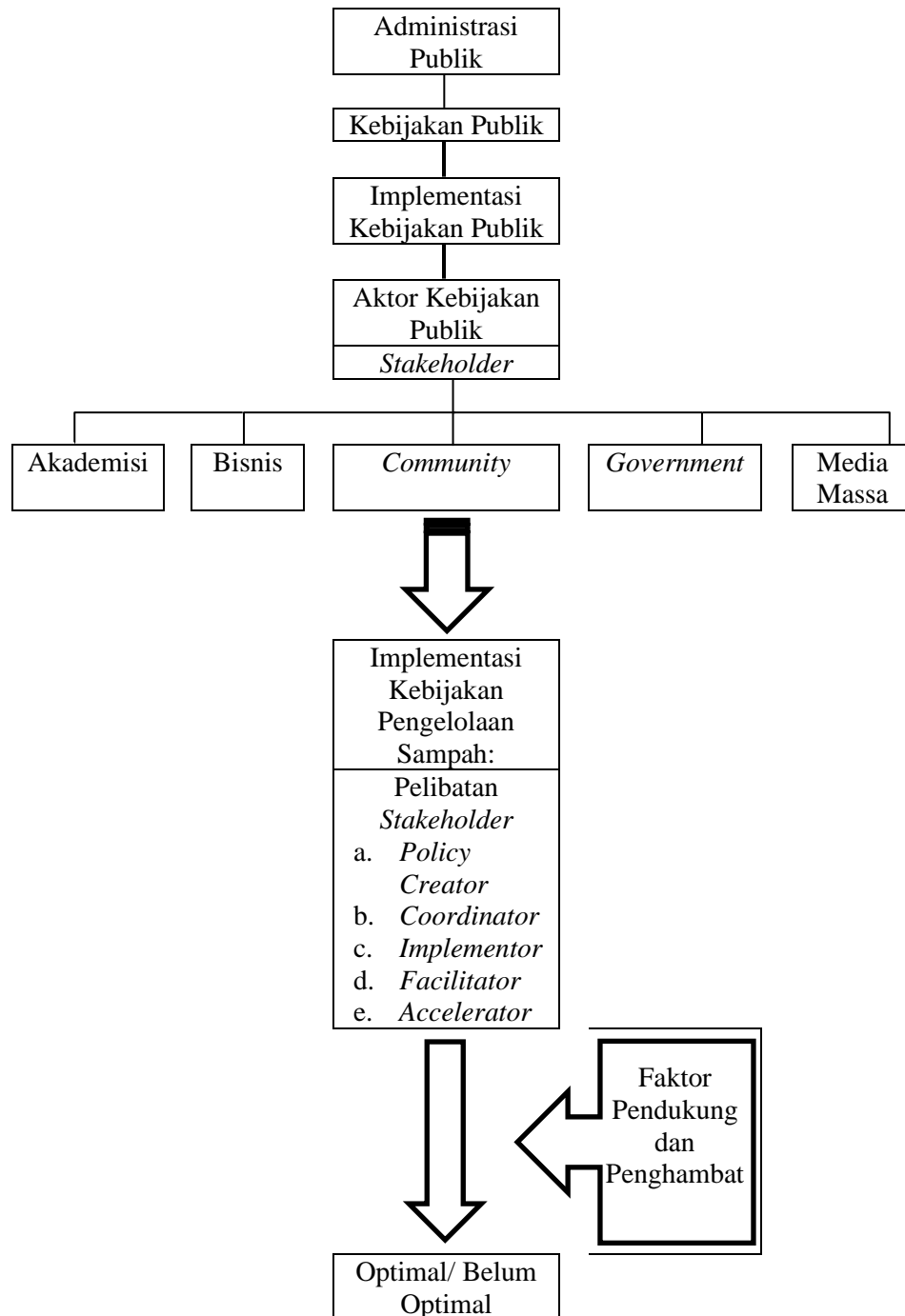
meminimalkan sampah yang dihasilkan dan memaksimalkan pemanfaatan kembali sumber daya yang ada.

Teori pengelolaan sampah yang diperkenalkan oleh Paul Connett mengusung konsep Zero Waste. Konsep ini bertujuan untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Paul Connett mendorong pendekatan hierarki daur ulang yang meliputi langkah-langkah berikut:

- a. *Prevention*, yakni mengurangi produksi sampah dengan mengurangi konsumsi, menggantikan bahan berbahaya, dan mendesain produk yang lebih tahan lama.
- b. *Reduction*, yakni mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan meminimalkan pembungkusan berlebihan dan penggunaan bahan sekali pakai.
- c. *Reuse*, yakni mendorong penggunaan kembali barang dan bahan sebanyak mungkin untuk mengurangi pembuangan sampah.
- d. *Recycle*, yakni memproses dan mengembalikan bahan sampah ke dalam siklus produksi.

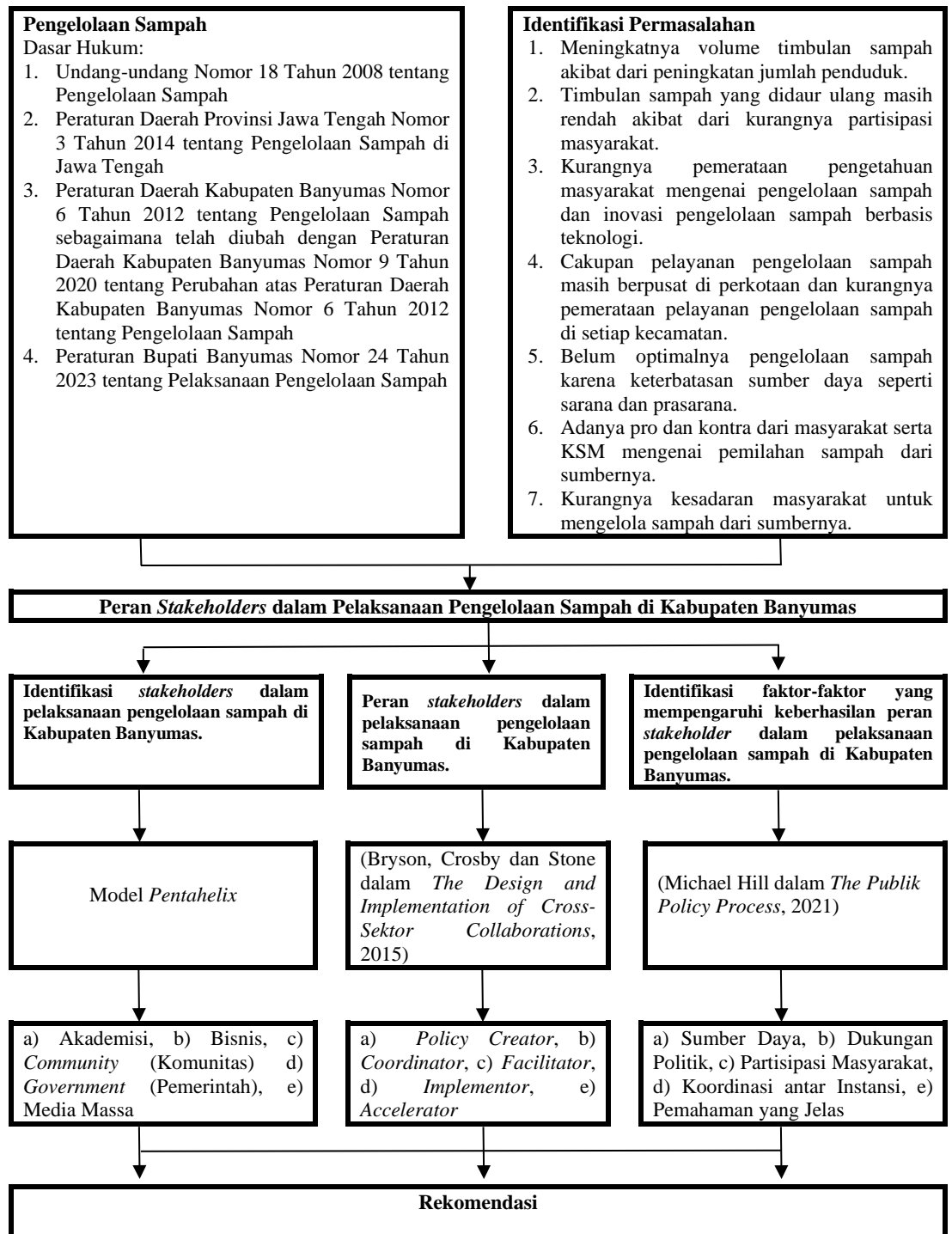
### 1.5.10 Kerangka Pikir Penelitian

#### 1. Kerangka Pikir



Gambar 9 Kerangka Pikir

## 2. Kerangka Penelitian



Gambar 10 Kerangka Penelitian



## 1.6 Operasionalisasi Konsep

**Tabel 3 Operasionalisasi Konsep**

No.	Fokus Penelitian	Fenomena Penelitian	Indikasi Penelitian
1	Identifikasi <i>Stakeholders</i>	1. Akademisi	Institusi pendidikan tinggi, perguruan tinggi, dan pusat penelitian yang berkontribusi pada pengetahuan dan inovasi
		2. Bisnis	Sektor bisnis dan industri yang terlibat dalam produksi, pengembangan produk dan pemasaran barang dan jasa
		3. <i>Community</i>	Organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat yang memiliki peran dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat secara luas
		4. <i>Government</i>	Pihak yang terkait dengan kebijakan, regulasi dan pendanaan yang memengaruhi aktivitas inovasi dan pembangunan
		5. Media Massa	Institusi media dan platform komunikasi yang memainkan peran penting dalam mendukung penyebaran informasi dan advokasi
2	Peran <i>Stakeholders</i>	1. <i>Policy Creator</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak yang berperan dalam penentuan dan pengambilan keputusan.</li> <li>• Bentuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.</li> </ul>
		2. <i>Coordinator</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak yang berperan melaksanakan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lain.</li> <li>• Bentuk koordinasi yang dilakukan dengan <i>stakeholder</i> lain.</li> </ul>
		3. <i>Facilitator</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak yang berperan memfasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.</li> </ul>

No.	Fokus Penelitian	Fenomena Penelitian	Indikasi Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk fasilitas yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.</li> </ul>
		4. <i>Implementor</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak yang berperan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.</li> <li>• Bentuk pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.</li> </ul>
		5. <i>Accelerator</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak yang berperan dalam mendorong percepatan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.</li> <li>• Bentuk kontribusi yang dilakukan dalam mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan.</li> </ul>
3	Faktor Keberhasilan Peran <i>Stakeholder</i>	1. Sumber Daya	Ketersediaan sumber daya (dana, personel, teknologi, dan infrastruktur)
		2. Dukungan Politik	Dukungan dari para pemimpin politik (legislatif dan eksekutif).
		3. Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keikutsertaan dalam pelaksanaan kebijakan</li> <li>• Penyampaian aspirasi</li> </ul>
		4. Koordinasi antar Instansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk koordinasi yang dijalankan</li> <li>• Intensitas koordinasi yang dijalankan</li> </ul>
		5. Pemahaman yang Jelas	Pemahaman yang jelas tentang tujuan, prosedur, dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan.

### 1.6.1 Definisi Konsep

#### 1. Identifikasi *Stakeholders*

*Stakeholder* merupakan pihak-pihak baik individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi tercapainya suatu tujuan. Dalam hal ini, mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan model Pentahelix.

#### 2. Peran *Stakeholder*

Peran *stakeholders* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini melihat tugas dan fungsinya dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan konsep klasifikasi peran *stakeholder* dari Bryson

#### 3. Faktor Keberhasilan Peran *Stakeholder*

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan peran *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam seluruh kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas berdasarkan uraian faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan menurut Michael Hill.

## 1.6.2 Definisi Operasional

### 1. Identifikasi *Stakeholder*

*Stakeholder* meliputi individu maupun kelompok yang terlibat dalam pencapaian tujuan yang dalam hal ini dilihat dari keterlibatan pihak-pihak dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Identifikasi *stakeholder* diklasifikasikan menggunakan model Pentahelix yang dibagi menjadi 5 (lima) unsur yakni:

#### a. Akademisi

*Stakeholder* Akademisi merupakan *stakeholder* yang berasal dari institusi pendidikan tinggi, perguruan tinggi, dan pusat penelitian yang berkontribusi pada pengabdian, pengetahuan dan inovasi.

#### b. Bisnis

*Stakeholder* Bisnis merupakan *stakeholder* yang berasal dari sektor bisnis dan industri yang terlibat dalam produksi, pengembangan produk dan pemasaran barang dan jasa.

#### c. *Community*

*Stakeholder* Community merupakan *stakeholder* yang berasal dari organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat yang memiliki peran dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat secara luas,

d. *Government*

*Stakeholder* Government merupakan *stakeholder* yang terkait dengan kebijakan, regulasi dan pendanaan yang memengaruhi aktivitas inovasi dan pembangunan

e. *Media Massa*

*Stakeholder* Media Massa merupakan *stakeholder* yang berasal dari institusi media dan platform komunikasi yang memainkan peran penting dalam mendukung penyebaran informasi dan advokasi.

2. *Peran Stakeholder*

Peran *stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian tujuan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang dalam hal ini peran pada pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Untuk melihat peran *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilihat melalui:

- a. *Policy Creator*, proses pembuatan keputusan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Untuk melihat peran *policy creator* dalam kebijakan dapat melalui pihak yang berperan besar dalam penentuan dan pengambilan keputusan.
- b. *Coordinator*, proses koordinasi yang dilakukan dengan berbagai *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Untuk melihat peran koordinator dalam kebijakan dapat melalui:

- 1) Adanya koordinasi antar *stakeholder*
  - 2) Bentuk koordinasi dan kerjasama yang dilakukan *stakeholder*
- c. *Facilitator*, peran *stakeholder* dalam memfasilitasi kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Untuk melihat peran fasilitator dalam kebijakan dapat melalui:
- 1) Pihak yang memberikan fasilitas
  - 2) Bentuk fasilitas yang diberikan
  - 3) Kelompok sasaran yang diberikan fasilitas
- d. *Implementor*, peran dari berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Untuk melihat peran implementor dalam kebijakan dapat melalui *stakeholder* yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.
- e. *Accelerator*, peran *stakeholder* lain yang turut terlibat membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Untuk melihat peran akselerator dalam kebijakan dapat melalui perannya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Selain itu, dapat pula dilihat melalui bentuk kontribusi nyata yang dilakukan dalam mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yang berkelanjutan.

### 3. Faktor Keberhasilan Peran *Stakeholder*

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan merupakan hal yang dapat mendorong maupun menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini, beberapa aspek menjadi indikasi dalam mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat peran *stakeholder*, yaitu sebagai berikut:

#### a. Sumber Daya

Faktor Sumber Daya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dapat dilihat melalui:

- 1) Ketersediaan dana
- 2) Kecakapan personel
- 3) Kemajuan teknologi
- 4) Kelengkapan infrastruktur

#### b. Dukungan Politik

Faktor Dukungan Politik dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari:

- 1) Dukungan pemimpin tingkat eksekutif
- 2) Dukungan pemimpin tingkat legislatif

#### c. Partisipasi Masyarakat

Faktor Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari:

- 1) Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan

2) Penyampaian aspirasi

d. Koordinasi antar Instansi

Faktor Koordinasi antar Instansi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dapat diketahui melalui:

1) Bentuk koordinasi dan kerjasama yang dilakukan

2) Kuantitas jalinan koordinasi yang dilakukan

e. Pemahaman yang Jelas

Faktor Pemahaman yang Jelas dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dapat dilihat melalui:

1) Pemahaman alur dan prosedur pelaksanaan pengelolaan sampah

2) Pemahaman tugas dan pokok fungsi *stakeholder*.

## 1.7 Argumen Penelitian

Kabupaten Banyumas terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan pusat ibukota di Purwokerto. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penulis mengungkapkan argumen berupa peran dan partisipasi *stakeholders* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas melibatkan dari berbagai sektor baik dari sektor pemerintahan, sektor publik dan swasta, serta lapisan masyarakat sendiri mengingat permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama dan



masalah krusial dimana *impact* yang ditimbulkan dari tidak terkelolanya sampah dengan baik dapat dirasakan oleh seluruh belahan di dunia.

Oleh karena itu, dalam mengatasi sampah tidak bisa hanya bergantung pada salah satu pemangku kepentingan saja sehingga dibutuhkan adanya keterlibatan peranan pemangku kepentingan lain guna menciptakan kolaborasi yang dapat berkelanjutan. Adanya peran dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan non pemerintah diharapkan dapat melengkapi peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengatasi sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah secara optimal.

## **1.8 Metode Penelitian**

Metode penelitian dan teknik penelitian merupakan elemen yang sangat penting dalam proses penelitian. Metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah (Silalahi, 2018), sementara teknik penelitian dapat didefinisikan sebagai prosedur-prosedur khusus yang digunakan dalam metode tersebut (Basuki, 2010).

Metode penelitian merujuk pada rangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, yang umumnya dapat memiliki tiga sifat, yaitu:

1. Penemuan, yaitu tujuan penelitian untuk menemukan hal baru dalam suatu bidang pengetahuan tertentu.

2. Pembuktian, yaitu tujuan penelitian untuk membuktikan kebenaran atau kevalidan informasi atau pengetahuan yang ada.
3. Pengembangan, yaitu tujuan penelitian untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Khilmiyah (2016) merujuk pada Bogdan dan Taylor untuk mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan, serta perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui proses berpikir induktif (Khilmiyah, 2016). Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena kompleks dan dinamisnya permasalahan yang akan diteliti sehingga perolehan data yang didapat dari narasumber perlu dijangar menggunakan metode yang lebih alamiah seperti wawancara.

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta telaah literatur dan dokumentasi untuk memberikan gambaran faktual dan hasil analisis tentang peran serta aktor kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Dalam penelitian deskriptif, data yang dihimpun dan diambil yaitu kata-kata, gambar, dan lain-lain. Data yang terhimpun diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi, dokumen

sekunder, dan rekaman percakapan. Dengan menggunakan penelitian deskriptif, peneliti dapat menggali realita yang terjadi di lapangan sedalam-dalamnya serta mendeskripsikannya dengan penjelasan yang tepat.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah wilayah atau tempat dimana penelitian dilaksanakan. Situs penelitian ini akan dicari data-data yang dibutuhkan oleh peneliti agar hasil penelitian dapat dibuat dengan maksimal. Situs penelitian yang dipilih peneliti dalam pelaksanaan penelitian yaitu dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Latar belakang peneliti memilih Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian karena capaian pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan pengelolaan sampah dimana Kabupaten Banyumas dinilai mampu menjadi leading pertama dalam mengelola sampah, diantaranya dapat mengubah sampah menjadi uang.<sup>4</sup>

Lokasi penelitian kualitatif ini bertempat di Kabupaten Banyumas dimana Kabupaten Banyumas telah melakukan upaya pengurangan sampah tahunan capaian pengurangan sampah sebanyak 66,795.00 ton/tahun dengan persentase pengurangan sampah menempati peringkat pertama se-Jawa Tengah yakni 34.19%. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga telah mengoptimalkan penanganan sampah tahunan dengan total penanganan sebanyak 124,682.72 ton/tahun dengan persentase penanganan sampah

---

<sup>4</sup> <https://infopurwokerto.com/mengenal-smart-green-asean-cities-sgac-yang-nobatkan-banyumas-jadi-tuan-rumah/>

sebesar 63.82%. Oleh karena itu, sampah di Kabupaten Banyumas masih terbilang telah dikelola baik yakni dengan capaian tahunan sebesar 191,477.72 ton/tahun dan menempati peringkat 15 nasional dengan persentase 98.01%. (SIPSN, 2022).

### 1.8.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian merujuk pada pihak yang menjadi fokus utama penelitian untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diselidiki. Mereka juga disebut sebagai informan, yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang relevan terkait dengan situasi dan kondisi yang menjadi fokus penelitian. Subyek penelitian ini biasanya terlibat langsung dalam konteks lokasi penelitian dan dapat memberikan wawasan yang berharga kepada peneliti. Menurut Sugiyono (2013), *purposive sampling* merupakan metode pengambilan informan atau sumber data yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memilih subjek yang dianggap paling relevan atau memiliki keahlian khusus dalam topik penelitian yang sedang diinvestigasi. Dengan demikian, peneliti memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang harus dipenuhi oleh informan dalam penelitian kualitatif ini. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dianggap paling relevan atau *representative* terhadap fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat lebih kaya dan bermakna.

Teknik yang digunakan untuk memilih informan dalam penelitian adalah *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini penting karena tidak semua informan memiliki karakteristik atau pengalaman yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti dapat memilih informan yang dianggap paling mewakili atau relevan dengan aspek-aspek yang ingin diselidiki dalam penelitian tersebut. Sebagai hasilnya, data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan akurat terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.

Teknik *purposive sampling* dipakai karena peneliti dalam memilih informan memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu yakni mengenai korelasi tugas dari pekerjaan masing-masing informan terhadap topik yang diteliti oleh peneliti. Teknik ini memiliki tujuan untuk mendapatkan kunci informan terkait dengan peran *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Akan tetapi, berdasarkan kebutuhan data di lapangan masih diperlukan informasi lebih sehingga informan tambahan dipilih secara *snowball sampling*.

Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas serta membantu mewujudkan penanganan sampah yang terpadu di Kabupaten Banyumas diantaranya yaitu:

**Tabel 4 Informan Penelitian**

No.	Kriteria	Informan	Teknik
1.	Pemerintah	a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas	<i>Purposive</i>
		b. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	<i>Purposive</i>
		c. Staf Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	<i>Snowball</i>
		d. Fasilitator Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	<i>Snowball</i>
		e. Kepala Pengelola TPA BLE Kabupaten Banyumas	<i>Purposive</i>
2.	Swasta	Ketua Koperasi KSM Kabupaten Banyumas	<i>Purposive</i>
3.	Masyarakat	a. Ketua Paguyuban KSM Kabupaten Banyumas	<i>Purposive</i>
		b. Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Kamandaka (PDU Bobosan)	<i>Purposive</i>
		c. Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Mekar Sari (TPST Sumbang)	<i>Purposive</i>
		d. Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Sumber Makmur (TPS 3R Cilongok).	<i>Purposive</i>

Sumber: Analisis Penulis, 2023

#### 1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Angka

Meliputi data berupa rata-rata, jumlah frekuensi dan lain-lain.

b. Data Tertulis

Meliputi data berupa uraian teks seperti undang-undang, peraturan, keputusan, kesepakatan bersama, artikel jurnal, berita, buku, dan lain-lain.

c. Daftar Tabel

Meliputi data yang ditampilkan dalam bentuk tabel.

d. Data Gambar

Meliputi data berupa gambar, diagram, kurva, grafik dan lain-lain.

Peneliti menggunakan kombinasi dari ke-empat (4) jenis data tersebut untuk mendapatkan data yang signifikan dan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian.

### 1.8.5 Sumber Data

Untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh data penelitian seperti yang telah dijelaskan bahwa sumber data dikelompokkan berdasarkan asal sumbernya yaitu sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian atau informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti literatur, dokumen resmi, atau basis data yang relevan.

Data primer merujuk pada informasi yang merupakan data utama dan diperoleh secara langsung dari lapangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sujarweni (2014). Data primer merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan oleh organisasi yang menggunakan atau menyediakan data tersebut. Keterangan yang termanifestasi dalam bentuk kata-kata dan perilaku juga termasuk dalam sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan atau wawancara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Soeratno (2008).

Data primer sering disebut sebagai data asli karena bersifat baru dan belum diolah sebelumnya. Untuk memperoleh data primer, peneliti dapat mengumpulkannya secara langsung melalui berbagai metode, seperti observasi atau pengamatan. Metode yang bisa digunakan peneliti untuk mengumpulkan sumber data primer termasuk observasi lapangan, penggunaan dokumen pribadi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait



mengenai peran *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (Sujarweni, 2014). Data sekunder dapat berasal dari sejumlah sumber, termasuk skripsi, artikel jurnal, tesis, dokumen resmi, sumber pustaka, literatur, penelitian sebelumnya, buku, dan lain sebagainya, yang dapat memberikan dukungan informasi yang relevan untuk penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini seperti salinan peraturan undang-undang terkait pengelolaan sampah di Indonesia dan Kabupaten Banyumas, dokumen resmi instansi seperti data kependudukan dari Biro Pusat Statistik (BPS), data sampah dari website SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berita online, buku, artikel dan penelitian terdahulu terkait peran *stakeholder* dan pengelolaan sampah.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah tahapan penting dalam penelitian karena hasilnya akan mempengaruhi keberhasilan keseluruhan penelitian. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

## 1. Observasi

Adler & Adler, seperti yang disebutkan dalam Hasanah (2017), menekankan bahwa observasi menjadi dasar utama dari semua teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, terutama dalam ilmu sosial dan perilaku manusia. Morris, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hasanah (2017), mendefinisikan observasi sebagai tindakan mencatat gejala dengan menggunakan alat bantu tertentu dan merekamnya untuk tujuan ilmiah atau tujuan lainnya. Observasi adalah elemen yang signifikan dalam proses pengumpulan data, di mana informasi diperoleh secara langsung dari situasi yang diamati, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Semiawan (2010). Zainal Arifin, yang dikutip dalam buku yang disebutkan dalam (Kristanto, 2018), menjelaskan bahwa observasi adalah suatu proses yang melibatkan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai fenomena dalam situasi nyata atau situasi yang dibuat-buat.

Observasi merupakan tahapan pengamatan secara sistematis terhadap suatu fenomena baik itu aktivitas manusia maupun pengaturan fisik berupa sikap, perilaku maupun tindakan secara berkelanjutan hingga dapat menghasilkan fakta. Melalui observasi, peneliti diharapkan mampu mencermati situasi dan kondisi lapangan sehingga memudahkan dalam melakukan

penelitian. Observasi dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Unit Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan (UPKP Wilayah Purwokerto, Kembaran, Banyumas, Sumpiuh, Ajibarang, dan Wangon) serta di Fasilitas Pengelolaan Sampah (TPST/Hanggar, TPS 3R, PDU, dan TPA BLE)

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilaksanakan guna memperoleh informasi dengan cara melakukan interaksi antara peneliti dengan informan. Menurut Susan Stainback, yang disebutkan dalam (Sugiyono, 2013), tujuan dari kegiatan wawancara adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan ide melalui dialog tanya jawab, sehingga memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu topik tertentu. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang cara partisipan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang diamati. Pentingnya wawancara terletak pada kemampuannya untuk mengeksplorasi sudut pandang dan pengalaman partisipan secara lebih menyeluruh, yang mungkin tidak terungkap melalui observasi saja.

Penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu wawancara dilaksanakan secara bebas karena tidak terikat dengan pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan informan yang terlibat seperti Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Staf Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Fasilitator Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Kepala Pengelola TPA BLE Kabupaten Banyumas, Ketua Koperasi KSM Kabupaten Banyumas, Ketua Paguyuban KSM Kabupaten Banyumas, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Kamandaka (PDU Bobosan), Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Mekar Sari (TPST Sumbang), dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Sumber Makmur (TPS 3R Cilongok).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berasal dari catatan penting baik itu dari lembaga maupun perorangan. Dokumentasi memiliki peran sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi menjadi sumber penguat dalam penelitian karena sifatnya yang dapat bertahan lama.

Menurut Sugiyono (2013), dokumentasi dapat mengambil berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Penerapan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah langkah yang diambil oleh peneliti untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber media cetak yang membahas tentang subjek penelitian yang akan diteliti. Dengan mengandalkan dokumentasi, peneliti dapat mengakses berbagai materi yang telah dipublikasikan, seperti artikel, laporan, buku, dan materi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks dan isu yang terkait dengan subjek penelitian.

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu transkrip wawancara dengan informan, bukti foto dengan informan serta dokumen yang berkaitan dengan peran *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

#### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan meninjau literatur keperpustakaan, mengumpulkan buku, dan memeriksa berbagai bahan tertulis serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian mengenai peran pemangku kepentingan, peneliti menggunakan studi pustaka yang mencakup jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti.

##### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama peneliti masih berada di lapangan, dan dalam proses ini digunakan model *Miles and Huberman*, seperti yang dijelaskan dalam Sugiyono (2013). Model ini melibatkan aktivitas analisis data kualitatif secara integratif dan berkelanjutan hingga semua aspek data terkaji secara menyeluruh. Proses ini berlangsung hingga data yang dikumpulkan menjadi jenuh, atau tidak lagi memberikan tambahan informasi baru.

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam Wanto (2017) yang terdiri dari Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

Dengan menerapkan teknik-teknik ini, peneliti dapat mengelola data yang terkumpul, mengidentifikasi pola atau tema yang muncul, dan pada akhirnya menyusun kesimpulan atau memverifikasi temuan penelitian.

#### 1) *Data Condensation*

Kondensasi data (*data condensation*) merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### 2) *Data Display*

Penyajian Data (*Data Display*) dilakukan dengan menggunakan grafik, *timeline*, tabel, dll. sehingga lebih mudah dipahami karena diperoleh data yang terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan. Selain itu, penyajian data dengan narasi teks juga mempermudah pemahaman karena dapat menggambarkan secara faktual suatu pola hubungan. Tahapan penyajian data dilakukan pengumpulan data yang terstruktur sehingga menjadi gambaran ringkas dan data dapat dianalisis

dengan segera hingga dapat ditarik kesimpulan yang membenarkan atau melanjutkan ke tahapan analisis selanjutnya. Penyajian data yang disajikan berupa naratif untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### 3) *Conclusion Drawing (Verification)*

Kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti masih bersifat sementara dan bisa mengalami perubahan. Dalam tahapan penarikan dan verifikasi kesimpulan, peneliti harus menguji keabsahan, kekuatan dari data yang telah dikumpul, direduksi dan disajikan agar dapat ditarik kesimpulan sehingga terciptanya keputusan.

Peneliti menggunakan tahapan kondensasi, dimana data dicatat yang didapat dari catatan lapangan, pengamatan, transkrip wawancara terkait dengan peran *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah untuk ditelaah dan memisahkan mana data yang perlu dimasukkan dan tidak dimasukkan. Kemudian data tersebut dihimpun dan disajikan secara naratif dan terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan dari data yang ada untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.



### 1.8.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Untuk menjamin kualitas penelitian kualitatif, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Menurut Sugiyono (2013), pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif mencakup beberapa aspek, termasuk uji *credibility* (kepercayaan), uji *transferability* (transferabilitas), uji *dependability* (keandalan), dan uji *confirmability* (konfirmasiabilitas). Namun, dalam penelitian kualitatif ini, penulis hanya menggunakan uji kredibilitas yang terdiri dari beberapa tahapan seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, melibatkan teman sejawat dan *memberchecking* untuk menjamin serta memastikan kualitas penelitian kualitatif ini berdasarkan riset lapangan yang dilakukan.

Uji kredibilitas, yang dikenal juga sebagai uji validitas dalam penelitian kualitatif, bertujuan untuk memastikan bahwa data memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal ini tercermin dari kesesuaian antara fakta yang ditemukan di lapangan dengan perspektif atau paradigma yang dimiliki oleh informan, narasumber, atau partisipan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan, mendeskripsikan, atau memahami peristiwa atau fenomena dari sudut pandang informan. Untuk meningkatkan kredibilitas data, beberapa langkah atau strategi yang dapat dilakukan meliputi perpanjangan observasi, ketelitian dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat,

analisis kasus yang kontraktif, dan pemeriksaan kembali oleh informan (Wijaya, 2018).

Triangulasi adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang melibatkan pemeriksaan data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode, dan dilakukan pada waktu yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih bervariasi dan komprehensif, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bungin (2001).

Triangulasi dibagi menjadi tiga (3) jenis, yaitu:

- 1) Triangulasi Sumber, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan keakuratan dan validitas informasi yang diperoleh.
- 2) Triangulasi Teknik, yaitu proses pengecekan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda tetapi kepada sumber yang sama. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan dengan menerapkan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data yang berbeda namun diterapkan kepada subjek yang sama.
- 3) Triangulasi Waktu, yaitu teknik pengecekan data yang mempertimbangkan perubahan waktu sebagai faktor yang dapat memengaruhi kredibilitas data. Dalam triangulasi waktu, penelitian dilakukan pada waktu atau dalam situasi yang berbeda dari sebelumnya untuk menguji keberlanjutan atau konsistensi data. Metode ini melibatkan penggunaan wawancara, observasi,

atau teknik lainnya pada waktu yang berbeda untuk memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif dan valid.

Kualitas data dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggabungkan tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hal ini penting mengingat fokus penelitian terkait peran *Stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas membutuhkan pengecekan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan keabsahan dan kredibilitasnya. Oleh karena itu, melibatkan informan yang beragam menjadi suatu keharusan agar data yang diperoleh mencakup sudut pandang yang beragam. Peneliti juga perlu menggabungkan berbagai teknik seperti wawancara dan dokumentasi untuk memastikan kualitas dan kredibilitas data. Selain itu, penting juga untuk memperoleh data dalam rentang waktu yang berbeda untuk melacak perkembangan data dari masa lampau hingga saat ini.